
Pengaruh Peran Audit Internal, Kompetensi Aparatur dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Yoga Hendy Ismoko¹, Cris Kuntadi², R. Luki Karunia³

¹ Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, yoga.hendy84@gmail.com

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, luki@stialan.ac.id

Corresponding Author: Yoga Hendy Ismoko¹

Abstrak:

Peran auditor internal, akuntabilitas dan praktik transparansi dan kontrol internal terhadap kinerja organisasi dengan kontrol internal sebagai variabel moderat, peran internal auditor, akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Peran dan akuntabilitas auditor internal tidak mempengaruhi kinerja organisasi, sementara transparansi dan kontrol internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Untuk menguji variabel moderating, kontrol internal bukan sebagai variabel moderat pada pengaruh peran auditor internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi. Akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan secara simultan, kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengaruh kompetensi ASN yang efektivitas dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel intervening. Dalam penelitian menunjukkan bahwa (a) kompetensi ASN tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, (b) Kedisiplinan ASN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, (c) teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Audit internal, Kompetensi aparatur, Standar akuntansi pemerintahan, Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu juga yang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Rina Parlina, 2022). Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Dea Arista *et al*, 2023).

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam suatu organisasi pencapaian kinerja menjadi prioritas utama, pimpinan organisasi akan menuntut setiap organ manajerial untuk menerapkan berbagai macam strategi untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Dalam menjalankan roda bisnisnya, organisasi baik yang berorientasi pada keuntungan (*Profit Oriented Organization*) maupun yang Nirlaba (*Non-Profit Oriented Organization*) memiliki indikator-indikator untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Dimana hasil capaian kinerja tersebut, dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan prospektif bagi manajemen (Oktariano M. *et al*, 2016).

Kinerja organisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih dimana dapat dilakukan penilaian hasil kerja secara simultan tentang mutu hasil pekerjaan (Yulistia *et al*, 2023). Oleh karena itu sebuah capaian kinerja organisasi bukan semata untuk memenuhi target yang diharapkan oleh pimpinan semata (parsial) tetapi dapat menjadi sarana bagi organisasi untuk menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil sehingga memberikan dampak positif bagi kelangsungan organisasi (simultan) kedepannya, sama halnya dengan perusahaan swasta pada umumnya, organisasi sektor publik (organisasi/instansi pemerintah) juga memiliki prioritas untuk mencapai kinerja organisasi. Dalam memenuhi target kinerjanya, organisasi pemerintah senantiasa menyusun strategi guna efektifitas pencapaian target kinerja yang diharapkan.

Untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, organisasi pemerintah harus dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah adalah dengan memperkuat sistem pengendalian internal organisasi. Pengendalian internal sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Pengendalian internal akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi capaian yang dihasilkan, serta keberhasilan kinerja dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dalam suatu organisasi pengendalian internnya itu lemah maka juga akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal dan itu akan sangat berdampak pada output yang dihasilkan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, instansi pemerintah harus memiliki instrumen operasional yang kuat (Putri T. *et al*, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengendalian internal dapat membantu organisasi secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi, dalam ini termasuk kinerja organisasi. Implementasi pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam PP 60/2008 salah satunya adalah dengan memperkuat unit kerja fungsional pengawasan pada organisasi pemerintah sebagai unit/satuan kerja yang bertugas secara fungsional melaksanakan tugas/pekerjaan audit internal atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam praktiknya, instansi pemerintah saat ini cukup pro-aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan organisasi yang baik (*good governance*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas untuk membangun hipotesis untuk riset selanjutnya adalah:

1. Apakah pengaruh peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah?

-
2. Apakah kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah?
 3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah?

KAJIAN TEORI

Pengaruh Peran Audit Internal

Pengaruh peran audit internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Balqis Nagita FZ, *et al*, 2022). Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yaitu pimpinan organisasi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Penilaian Risiko yaitu pimpinan organisasi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko melalui aktifitas identifikasi dan analisis risiko. Kegiatan Pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Informasi dan Komunikasi yaitu kebijakan terkait penyediaan informasi serta sarana komunikasi yang tepat agar informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan efektif. Pemantauan pengendalian intern (*monitoring*) yaitu pemantauan dilakukan dengan dengan menciptakan desain pemantauan yang secara sistematis dapat dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa yang dimaksud pengendalian intern (Melinda CP, *et al*, 2020).

Menurut Ratri M. *et al*, (2020). Audit adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi, tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidak wajaran yang dilakukan dalam perusahaan. Proses audit sangat diperlukan suatu perusahaan/organisasi karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan standar audit yang berlaku umum atau lebih singkatnya audit pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi sistem, proses atau produk, audit di laksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang di sebut auditor.

Menurut Wibowo *et al*, (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Menurut Marisa Y. *et al*, 1 (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah yang berstatus badan layanan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi masing-masing secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut Noormansyah I. *et al* (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi ASN, dan penerapan good governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah, pengaruh kompetensi pegawai negeri sipil terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah dan pengaruh penerapan good governance terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kompetensi pegawai negeri sipil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kemampuan tersebut berbasis sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional (.....)

Kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Rovieyanti D. *et al*, 2021). Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat diterapkan. Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif, dan efisien (Arista D, *et al*, 2023). Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Hal ini di perkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati (2014) dan I Putu Upabayu (2014), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nurwani *et al*, 2023, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan (Ningtyas, 2017);

1. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan;

-
2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya;
 3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan;
 4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan;
 5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam perancangan dan menyuguhkan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada (KKAP) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD yang sangat diperlukan untuk lingkungan pemerintahan, tidak hanya dalam lingkungan pemerintahan namun LKPD yang baik akan dimanfaatkan oleh khalayak umum sebagai landasan dalam pengambilan keputusan akuntansi yang melibatkan pemerintah di dalamnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan Liza R. at all, (2014) dan Ani M. at all, (2016), menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan standar akuntansi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan tata kelola keuangan negara (Sari I. at all, 2023). Banyak pihak membutuhkan standar akuntansi pemerintah, di antaranya penyajian laporan keuangan, auditor, pengguna laporan keuangan, akademisi, dan organisasi profesi akuntansi (Sulastris D. 2023). Agar standar akuntansi memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi maka standar akuntansi harus disusun oleh badan penyusun standar yang independen. Di Indonesia badan penyusun standar akuntansi adalah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menyusun standar akuntansi sektor bisnis dan sosial serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk standar akuntansi pemerintahan. Pada tingkat internasional terhadap International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) untuk sektor publik. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia mengacu pada IPSAS dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Standar akuntansi pemerintah bukan sesuatu yang statis tetapi akan terus berkembang mengikuti perkembangan praktik akuntansi dan teori yang ada (Mahmudi, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri M.A. at al (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan setiap organisasi membutuhkan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen tersebut diperlukan untuk menjamin dikelolanya organisasi secara efisien dan efektif. Dalam kebanyakan organisasi yang sudah besar, fungsi pengendalian manajemen sudah tersistem dengan baik. Desain sistem pengendalian manajemen perlu dilakukan secara komprehensif, tidak parsial. Sistem pengendalian manajemen yang komprehensif meliputi pengintegrasian struktur dan budaya atau perilaku organisasi, memperhatikan aspek internal dan eksternal, aspek pengendalian formal dan informal, pengendalian kinerja keuangan dan nonkeuangan. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi manajemen kinerja terpadu karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Efisiensi dan efektivitas tersebut merupakan dasar untuk melakukan penilaian kinerja, maka, dalam mendesain sistem pengukuran kinerja, terlebih dahulu harus dipahami desain sistem pengendalian manajemen organisasi (Mahmudi, 2015). Permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap) dari aspek kualitas penataan personal. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, karena terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Sukmaningrum (2012).

Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki peran sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial (Harun M, 2021). Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat powerful untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakurata, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik (Darmayanti R.A at all, 2018).

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Purnamasari, Hidayati, dan Amin (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Auditor Internal dan Kontrol Internal Secara Simultan.	Sistem Audit Internal, Pengendalian Internal dan Kontrol Internal Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan Serta Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Peran Tata Kelola Audit Internal Secara Transparan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.
2	Septiawan (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Internal Dan Komitmen Organisasi.	Audit Internal Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Transparansi dan Akuntabel Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3	Muhammad Iqra Harun (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Akuntabilitas	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah.	Sistem Informasi Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4	Rizky Cahya Romadhona (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Manajemen, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi	Audit Manajemen, Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan.	Pengaruh Kinerja Manajerial melalui Good Corporate Governance, Budaya Organisasi dan Audit Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5	Ni Komang Kariani I, I Dewa Made Endiana, Putu Diah Kumalasari (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada LPD	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Etika Kepemimpinan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

		Di Kecamatan Sukawati.	pada LPD Di Kecamatan Sukawati.	Pemerintah Daerah pada LPD Di Kecamatan Sukawati.
6	Nilawati, Naz'aina, Muhammad Haykal (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireun.	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireun.	Pengaruh Quality Of Human Resources, Utilization Of Information Technology, Regional Financial Accounting System, Quality Of Local Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireun.
7	Bintang Alief Pratama, Ida Bagus Ketut (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Internal Audit	Audit Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance.
8	Cris Kuntadi, Juniarty Erika Magdalena Saragi, Syasi Ikhilami Syafira (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* sebagai bahan informasi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, untuk memperoleh data atau keterangan yang ada hubungan dengan penelitian ini maka digunakan data primer. Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber asli melalui wawancara tanpa perantara. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari *Mendeley*, *Scholar Google* dan *media online* lainnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Tugiman, 2006). Secara lebih spesifik, organisasi mengandalkan fungsi audit intern untuk membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal tidak hanya sebatas sebagai “detector” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampumendukung dan mendorong proses terwujudnya aparatur negara (Saptapradipta, 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa audit internal sangat menunjang pada tercapainya sasaran perusahaan yaitu efisiensi dan efektivitas yang merupakan bagian dari audit internal. Sasaran yang dicapai dari audit internal adalah dapat tercapainya kompetensi aparatur sipil negara. Agar dapat tercapainya sistem pengawasan yang baik maka pimpinan perusahaan harus membentuk suatu bidang pengawasan yang independen dan dapat bertanggung jawab, dan audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan, kinerja karyawan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen. Jadi semakin tinggi audit internal, maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan kompetensi aparatur negara. Hal ini didukung oleh penelitian (Rizky Cahya Romadhona, 2023) yang menyimpulkan bahwa Peran Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi aparatur negara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifudin, *et al.* (2020), Setiadi R.M, *at al.* (2020), Merawati, *at al.* (2014), Arafah F, *at al.* (2023), Marfiana R, *at al.* (2021), menunjukkan bahwa secara bersamaan peran internal auditor, akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal memiliki efek positif dan signifikan terhadap kompetensi aparatur sipil negara.

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Pelaksanaan kompetensi aparatur tidak terlepas dari aspek individu-individu yang ada di dalam perusahaan. Karena sebaik apapun sistem atau pengendalian yang dibuat tetapi individu atau personil di dalam perusahaan tidak memiliki komitmen untuk ikut serta dalam memajukan perusahaan, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif (Mc Caul *et al.*, dalam Pratolo, 2018:25). Dalam rangka menerapkan Kompetensi aparatur yang baik harus diiringi dengan kemauan serta keyakinan yang kuat dari individu-individu di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan demi kesejahteraan serta keberhasilan perusahaan. Karyawan atau anggota organisasi merupakan elemen penting dalam perusahaan, karena karyawan merupakan poros penggerak perusahaan. Setiap karyawan selain harus mengetahui prinsip-prinsip dari Kompetensi aparatur juga harus memahami prinsip-prinsip tersebut. Dengan begitu karyawan mampu turut serta mengimplementasikan prinsip Kompetensi aparatur dengan tujuan keberhasilan serta kesejahteraan perusahaan.

Setiap anggota organisasi haruslah mempunyai rasa untuk memiliki organisasi dan mampu mengimplementasikan tujuan organisasi, khususnya bagian-bagian pelaporan keuangan ataupun pengendalian, sehingga mereka akan merasa terdorong untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel (Septiawan, 2018). Dengan kata lain untuk terciptanya penerapan Kompetensi aparatur yang baik harus adanya komitmen organisasi dari dalam diri karyawan atau individu di dalam perusahaan. Komitmen manajemen menggambarkan keadaan emosi keterlibatan karyawan dalam organisasi. Aktifitas komitmen biasanya dilandasi atas dasar keyakinan moral dengan tidak mengutamakan keuntungan pribadi. Komitmen tersebut muncul sejalan dengan semakin kompetitifnya lingkungan yang dihadapi dunia bisnis. Komitmen yang tinggi dari para pegawai akan membantu tata kelola perusahaan yang mapan. Komitmen tersebut akan menjadi suatu hal yang membantu perusahaan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Semakin tinggi komitmen manajemen, maka semakin optimal penerapan Kompetensi aparatur pada perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian Indah Nurul Wulan, Kartika Djati, dan Endraria (2023) yang menyimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi aparatur.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhi *at al.* (2013), Andini *at al.* (2015), Kusumah *at al.* (2012), Emilda Ihsanti (2014), Oktania *at al.* (2016), menyatakan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan.

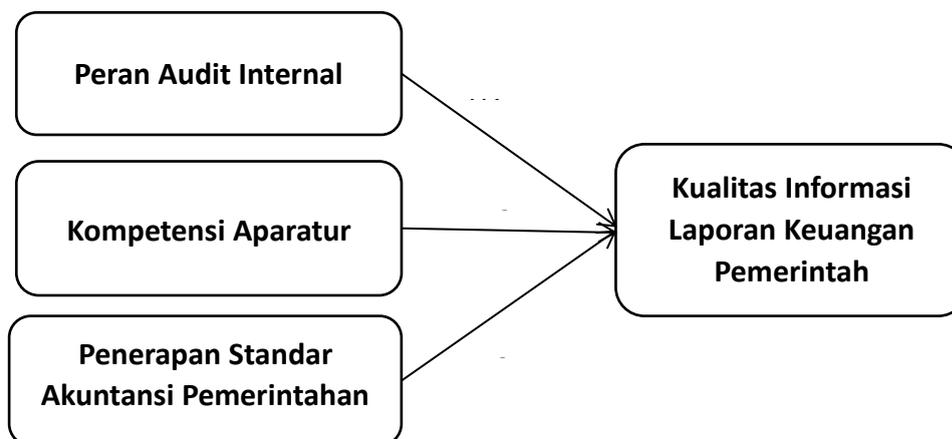
3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005:134) dalam Kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Kusumah (2012); Nugraheni dan Subaweh (2008). Hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwani N, et al. (2008), Budi P.J, et al. (2019), M. Ali Fikri, et al. (2015), menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh kerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas peran Audit Internal, Kompetensi Aparatur, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi Informasi Laporan Keuangan, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Sistem Informasi Akuntansi (Saefani Nur Hanifah & Cris Kuntadi, 2023).
- b) Kompetensi Sumber Daya Manusia (Dina Juniarti Barokah et al., 2023), (Nabila Zubaidi et al., 2019) dan (Sri Wahyuni et al., 2018).

-
- c) Kompetensi ASN dan Penerapan Good Governance (Irvan Noormansyah & Humairi Arkeda Sirkomba, 2022).
 - d) Pemanfaatan Teknologi Informasi (Rahmi Meutia & Muhammad Amar, 2020), (Rizky Rivaldo Peku Djawang, 2019).
 - e) Sistem Pengendalian Internal (Emilda Nur Safiri & Pingky Dezar Zulkarnain, 2021) & (Fice Handayani et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintahan sudah diterapkan, semakin baiknya penerapan akuntansi (sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan) akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi fokus pada bagian sumber daya manusia untuk terus meningkatkan kompetensi para pegawai.
3. Variabel penerapan good governance berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang fokus terhadap tata kelola pemerintah membutuhkan waktu untuk penyesuaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik.

Saran

1. Berdasarkan pengujian dan penjelasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman SAP, Penggunaan Teknologi Informasi, Pengawasan Internal, SDM, dan Komitmen Organisasi secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan secara parsial hanya variabel.
2. Pemahaman SAP, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan, sedangkan variabel pengawasan internal dan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan
3. Variabel Pemahaman SAP, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hal ini berarti jika pemahaman SAP, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia meningkat, maka nilai informasi laporan keuangan juga akan semakin baik dan berguna bagi para penggunanya, begitupun sebaliknya, jika pemahaman SAP, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia menurun maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah akan semakin memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah. Jakarta; Salemba Empat.
- Adhi, Daniel Kartika. Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal Stie Semarang, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826).
- Afrina, Dina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian

-
- Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
- Agoes Sukrisno, 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*, edisi ke 3 Jakarta: Fakultas Ekonomi UI .SS
- Andini dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1 Vol. 24No. 1 (2015).
- Andriyanto. 2013. Pengaruh Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada PT. BRI Cabang Jember. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Apriyana, H. 2008. Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Arafah, F., Sugianto, S., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Peran Audit Internal terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 3676–3683. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6261>
- Arifudin, Opan, Juhadi, J., & Sofyan, Y. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal dan audit internal terhadap pelaksanaan kompetensi aparatur . *jemasi: jurnal ekonomi manajemen dan akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138> .
- Aruan N, (2003). “Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur”.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cris Kuntadi (2015). *SIKENCUR (Menata Birokrasi Bebas Korupsi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Emilda Ihsanti. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada Kab.Lima Puluh Kota.
- Fitriadi, Maikel. 2013. Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Kota Pekanbaru). Skripsi. Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, Egit. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indonesian Institute of Corporate Governance. *Tata Kelola Perusahaan*. Retrieved February 20, 2013 from: <http://iicg.org/v25/tata-kelola-perusahaan>.
- Kusumah, Arif Andi. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya). Tasikmalaya. FE Universitas Siliwangi.
- Manossoh, H. (2016). Good corporate governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- Marfiana, R., & Gunarto, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Audit Internal dan Independensi Auditor Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(4), 166 - 185. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i4.516>
- Marshall B, Romney dan Paul John Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information System* .(Edisi 13).Prentice Hall
- Merawati, E. E., & Hatta, I. H. (2014). Pengaruh pengawasan komite audit, audit internal, audit eksternal terhadap kesehatan keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 335–349. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.269>
- Mulyadi, 2013, *Auditing Buku I*, Salemba Empat, Jakarta. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Oktania, Mia, dkk.2016. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi*.Nomor 2.Volume 2. Maret 2016.

-
- Pratiwi, I. (2013). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Keadilan Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening.
- Pratolo, S. 2006. Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer Pada Organisasi, Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Disertasi. Doktor.
- Riantiarno, Azlina, 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Kabupaten Rokan Hulu). Jurnal online. Universitas Riau.
- Ricky Agusiadi, Imas Rosita, 2022. Pengaruh Pengendalian Intern, Komite Audit dan Audit Intern Terhadap Good Corporate Governance di PT. Bio Farma Bandung, Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB) Volume 1 No 1 Juni 2022, Jakarta
- Riswanto, Natak. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
- Setiadi, R.M, Nuryatno, M. & Jamaluddin, J. (2021). Analisis peran pengendalian internal sebagai pemoderasi pengaruh peran auditor internal terhadap kinerja organisasi pada perguruan tinggi keagamaan islam negeri di indonesia. Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(1), 130-144. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i1.55>
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
- Sukmaningrum T, (2012). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi dipublikasi.
- Triwardana, Dhedy. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Jurnal Akuntansi. No 1. Volume 4. Februari 2017.
- Udiyanti, Atmadja dan Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No 1 Tahun 2014.
- Umar, Husen.2018. Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Rajagrafindo Pusada. Jakarta.
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37